

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita :BPK Pusat

Halaman 2

# Dana Parpol Rawan Korupsi

## Tjahjo : Penggunaan Diaudit BPK

**JAKARTA** - Anggaran bantuan untuk partai politik (parpol) Rp 1.000/suara sah rawan dikorupsi.

“Yang menjadi permasalahan, selama ini parpol sangat eksklusif (tertutup) terkait laporan keuangannya,” ujar Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman di Jakarta, Senin (28/8).

Menurut Jajang, hal itu jelas akan menimbulkan masalah ke depan, yang paling buruk adalah penyelewengan atau tindakan korupsi.

Menurut CBA, kebijakan pemerintah menaikkan dana parpol tidak lain hanya politis. Pemerintah Jokowi seperti menutup mata dengan realita yang ada.

Di tengah-tengah APBN defisit, utang semakin banyak, pemerintah justru jor-joran ke parpol. “Sangat jauh dari kata bijak dan akan melukai perasaan rakyat,” tegas dia.

Yang aneh sebenarnya, lanjut Jajang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik tersebut.

Hal ini memperlihatkan Sri Mulyani tidak punya konsistensi. Dia menyatakan bahwa terjadi penurunan penerimaan negara dan yang dilakukan adalah amputasi atau pemotongan anggaran dengan alasan efisiensi anggaran.

“Sekarang, penyetujuan kenaikan anggaran untuk partai. Ini sangat-sangat memberatkan beban keuangan negara,” tandasnya.

Dengan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik, orang partai seperti ketiban rezeki nomplok tanpa bekerja keras.

### Apresiasi

Padahal yang namanya dana untuk partai itu, bukan dapat dari negara, tapi harus dikumpulkan atau disumbang dari rakyat dong. Menurut dia, sekarang partai itu bukan milik rakyat, dan rakyat

tidak mau menyumbang partai.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyetujui usulannya terkait dana parpol. Di sisi lain, Tjahjo menegaskan bahwa dana bantuan untuk parpol Rp. 1000/suara itu sudah pernah ada sebelumnya.

“Pada 1999, seingat saya bantuan pemerintah untuk parpol sudah Rp 1000/suara. Kemudian pada era pemerintahan berikutnya, selama 10 tahun ini, didrop menjadi hanya Rp 108/suara. Saat menjadi Mendagri, saya sudah melempar wacana. Ekstremnya masak tidak bisa sih, dari anggaran yang ribuan triliun rupiah ini, Rp 1 triliun dialokasikan untuk bantuan parpol. Jadi Bu Sri Mulyani mengembalikan ke Rp. 1000/suara,” kata Tjahjo saat akan rapat dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Tjahjo, pada 2015 -2016 saat dia wacanakan tentang dana bantuan untuk parpol, kondisi anggaran belum memungkinkan.

“Baru setelah Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, dan terjadi pertumbuhan ekonomi, maka Bu Sri Mulyani mengembalikan dari Rp 108 ke Rp 1000. Dan itu juga sudah dibahas Panitia Anggaran DPR. Nanti setiap tahun akan dievaluasi, untuk tahun depan, apakah bisa dinaikkan lagi atau bagaimana. Ini sekadar bantuan. Sumber dana parpol itu dari iuran anggota, pihak ketiga yang tidak mengikat, dan ada partisipasi pemerintah yang bentuknya dana bantuan,” kata mantan Sekjen PDIP tersebut.

Menurut dia, bantuan dari pemerintah untuk parpol juga merupakan suatu yang wajar. Hal itu karena pemerintahan juga diisi oleh kader-kader parpol. Dana bantuan selama ini juga diaudit BPK.

“Pengalaman saya jadi Sekjen Partai, bantuan pemerintah untuk parpol itu diaudit BPK. Sejauh penggunaan untuk pengeluaran rutin atau kaderisasi partai, tidak masalah,” tandas Tjahjo. (di,F4-50)